



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 340/BUA.4/PL.02/07/2021 Jakarta, 15 Juli 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Target Sertifikasi Aset BMN berupa Tanah Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Untuk TA 2022.

Kepada Yth.  
Daftar terlampir  
di-  
tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-9/KN/KN.2/2021 tanggal 16 Februari 2021 hal Identifikasi dan Verifikasi Data Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 105/BUA.4/PL.07/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Identifikasi dan Verifikasi Data Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, serta menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pensertipikatan BMN berupa tanah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya TA 2021 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan ini disampaikan beberapa hal antara lain :

1. Sertifikasi BMN berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum tanah, melaksanakan tertib administrasi tanah, mengamankan fisik tanah. Adapun sesuai *road map* yang telah disusun, maka diharapkan kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah akan tuntas pada tahun 2022, yang artinya seluruh bidang tanah BMN pada Tahun 2022 sudah bersertipikat. Guna Penuntasan program tersebut, maka diperlukan data tanah yang akurat dan handal serta sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan, utamanya untuk tanah yang belum bersertipikat;
2. Aset BMN berupa tanah yang dimiliki, tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMANTAP, SIMAN dan SIPERMARI ini digunakan untuk kegiatan operasional tugas dan/atau dinas jabatan serta dikuasai oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia harus memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa **Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI**.
3. Berdasarkan telaah data Aset BMN berupa tanah, baik yang berasal dari DJKN Kementerian Keuangan RI, hasil monev Tim Auditor Bawas, dan pengecekan kembali dokumen kepemilikan tanah pada Aplikasi SIMAN dan SIPERMARI oleh Tim Internal Biro Perlengkapan didapatkan daftar rekapitulasi tanah seluruh satuan kerja yang masih memiliki dokumen tanah selain **Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** seperti Akta Jual Beli (AJB), Sertipikat Hak Milik (SHM), Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Surat Keterangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Gambar Ukur Situasi Tanah, Surat Keterangan Lainnya.
4. Terhadap satuan kerja yang sudah mempunyai dokumen kepemilikan tanah yang telah disebutkan pada point 2, saat surat ini sebelum diedarkan, satuan kerja dapat **mengkinikan** data terbaru (karena SHP pecah sertipikat/ hasil pengukuran ulang petugas BPN/ sertipikat naik status dari SHM menjadi SHP/ Penggantian format SHP yang baru) dengan luas tanah tercantum yang masih sama dengan dokumen sebelumnya atau sudah berubah dengan luas tanah tercantum yang telah diterbitkan dalam **Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** tersebut pada luasan tanah KIB di SIMAK BMN, dokumen tanah SIMAN, daftar tanah SIMANTAP dan dokumen tanah SIPERMARI dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi.

5. Bahwa satuan kerja yang masih mempunyai dokumen kepemilikan tanah yang telah disebutkan pada point 3 dan termasuk dalam daftar rekapitulasi pada lampiran dapat mengikuti program Pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2022 agar segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat guna mengusulkan seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat untuk disertipikatkan pada tahun 2022 agar dapat masuk ke dalam program Sertipikasi BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN RI TA 2022 dengan melaksanakan hal-hal berikut :
  - a) Apabila terdapat bidang tanah pada satuan kerja yang masuk dalam program Pensertipikatan BMN berupa tanah TA 2021 untuk memastikan apakah ada bidang tanah lainnya yang dokumen kepemilikan tanah belum bersertipikat sama sekali dapat berkoordinasi kembali kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan/atau Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat;
  - b) Menyiapkan kelengkapan dokumen pensertipikatan BMN pada tautan [https://bit.ly/Sertipikasi\\_BMN](https://bit.ly/Sertipikasi_BMN) (daftar kelengkapan terlampir) dapat berkoordinasi dengan KPKNL dan/atau Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat;
  - c) Melaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi data tanah bersama KPKNL setempat;
  - d) Memastikan batas patok tanah di lokasi/lapangan sesuai dengan data dukung dokumen kepemilikan tanah;
  - e) Melakukan update data BMN berupa tanah pada aplikasi SIMANTAP dan Master Aset pada SIMAN dan menyampaikannya kepada KPKNL;
  - f) Menghitung estimasi biaya balik/ganti nama dengan melampirkan perhitungan resmi dari Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat, biaya petugas satker untuk melakukan pendampingan pengukuran tanah di lapangan, estimasi biaya lainnya yang relevan terkait dengan Sertipikasi BMN berupa Tanah dapat tersedia pada RKAKL TA 2022 agar satuan kerja dapat berkoordinasi kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
  
6. Satuan kerja wajib melaporkan secara tertulis perihal konsultasi dan koordinasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi apabila memang sejak awal mempunyai masalah dokumen kepemilikan tanah dan/atau peristiwa *Force Majeure* terhadap keberadaan fisik bidang tanah yang digunakan oleh satuan kerja antara lain :
  - a) Satuan kerja sudah memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa **Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI**, akan tetapi terbakar, hilang karena bencana alam dan/atau kerusakan, hilang karena kelalaian petugas/aparatur peradilan/hakim, tidak diketahui keberadaannya namun sudah mengurusnya kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pemanahan Nasional (BPN) setempat namun mengalami kendala;
  - b) Satuan kerja hanya memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Akta Jual Beli (AJB), Sertipikat Hak Milik (SHM), Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah, Surat Keterangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Gambar Ukur Situasi Tanah, Surat Keterangan Lainnya dan pengurusan dokumen kepemilikan tanah pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pemanahan Nasional (BPN) yang berbelit-belit dan tak kunjung selesai;
  - c) Satuan kerja yang dari awalnya mendapatkan Aset BMN berupa tanah karena 1 (satu) atap dengan Mahkamah Agung RI karena Alih Status Penggunaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (d/h Departemen Kehakiman) dan Kementerian Agama, namun tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah apapun, hanya berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen kepemilikan tanah masih menjadi 1 (satu) dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Agama RI;
  - d) Dokumen kepemilikan tanah masih berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh perorangan/badan dan/atau dokumen lainnya yang sah oleh pihak lain dijadikan jaminan pada bank, yang mana bagian luasan dari Aset BMN yang tercatat masih bergabung menjadi 1 (satu) kesatuan dengan sertipikat induknya;
  - e) Keberadaan fisik bidang tanah saat ini yang dikuasai/terdapat sengketa oleh pihak ketiga, masyarakat, adat, BUMN, perusahaan swasta, dll;
  - f) Keberadaan fisik bidang tanah yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Mahkamah Agung RI cq Eselon 1/Pengadilan, namun belum tercatat pada SIMAK BMN;
  - g) Lokasi keberadaan fisik bidang tanah yang berada di kawasan hutang lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dll;
  - h) Lokasi keberadaan fisik bidang tanah yang tidak ditemukan, jauh dari jangkauan satuan kerja karena berada di beda kabupaten/kota dan/atau berada di pulau terluar;

- i) Tanah yang sudah cukup lama digunakan terdapat bangunan kantor dan/atau rumah dinas milik Mahkamah Agung RI cq Eselon 1/Pengadilan, namun tanah tersebut adalah pinjam pakai milik Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - j) Tanah yang sudah cukup lama digunakan terdapat bangunan kantor dan/atau rumah dinas milik Mahkamah Agung RI cq Eselon 1/Pengadilan, namun tanah tersebut belum dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - k) Perolehan tanah adalah merupakan wakaf dari suatu organisasi kemasyarakatan, organisasi massa, badan hukum dan/atau lainnya;
  - l) Alasan relevan lainnya terhadap pengurusan dan/atau kepemilikan dokumen kepemilikan tanah ditemui di lapangan.
7. Terhadap permasalahan yang dihadapi satuan kerja karena alasan-alasan yang disebutkan pada point 6, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat, DJKN Kementerian Keuangan RI dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

  
**Kepala Biro Perlengkapan**  
  
**ROSEFIANA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640612 198703 2 003**

Tembusan :

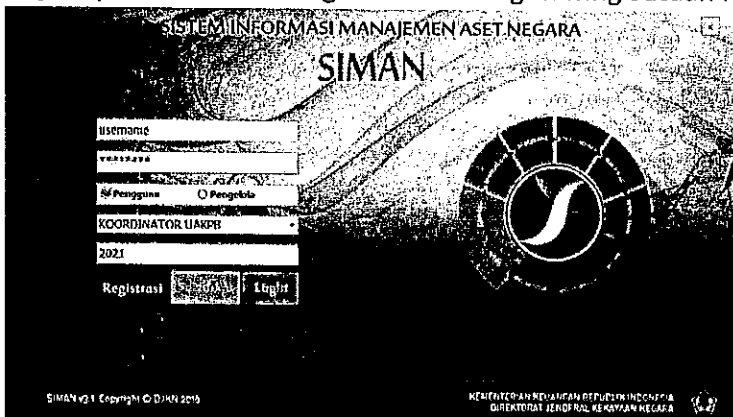
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
6. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI;
10. Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

54. Sekretaris Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
55. Sekretaris Pengadilan Agama Masohi;
56. Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon;
57. Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang;
58. Sekretaris Pengadilan Negeri Oelamasi;
59. Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Timika;
60. Sekretaris Pengadilan Negeri Jayapura;
61. Sekretaris Pengadilan Agama Manna;
62. Sekretaris Pengadilan Negeri Ternate;
63. Sekretaris Pengadilan Negeri Tobelo;
64. Sekretaris Pengadilan Agama Labuha;
65. Sekretaris Pengadilan Agama Morotai;
66. Sekretaris Pengadilan Agama Ternate;
67. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
68. Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
69. Sekretaris Pengadilan Negeri Batam;
70. Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
71. Sekretaris Pengadilan Negeri Fak Fak;
72. Sekretaris Pengadilan Negeri Sorong;
73. Sekretaris Pengadilan Agama Tarakan.

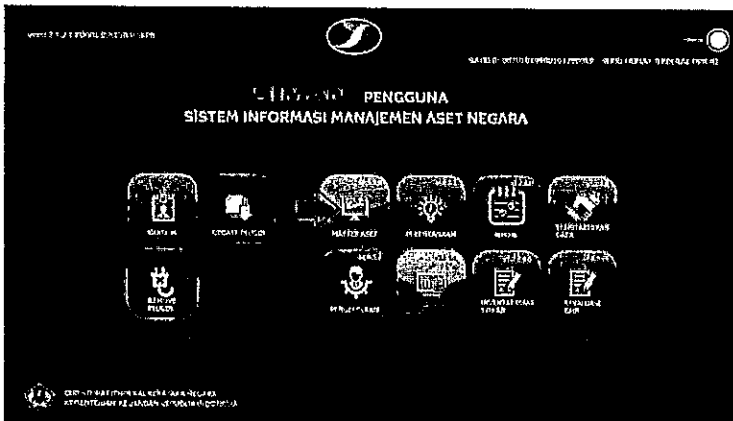


## PETUNJUK UPDATE DATA DOKUMEN SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH PADA MASTER ASET SIMAN

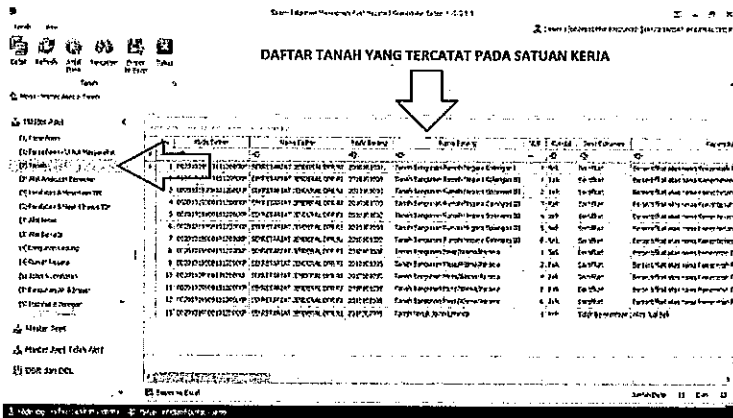
1. Login Aplikasi SIMAN dengan user masing-masing Satuan Kerja



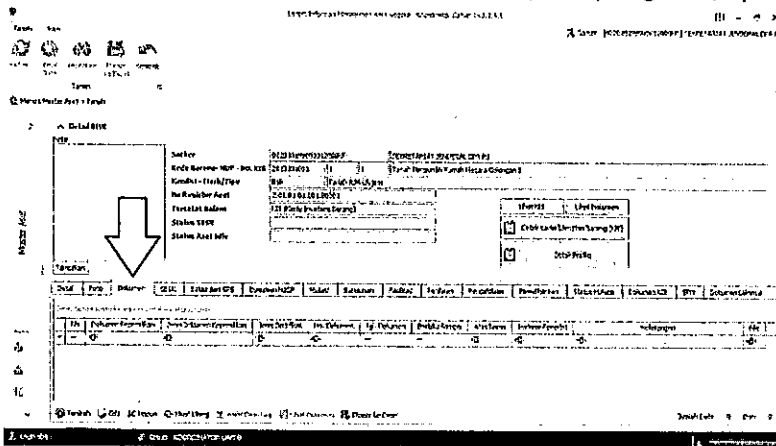
2. Pilih Plug-In Master Aset



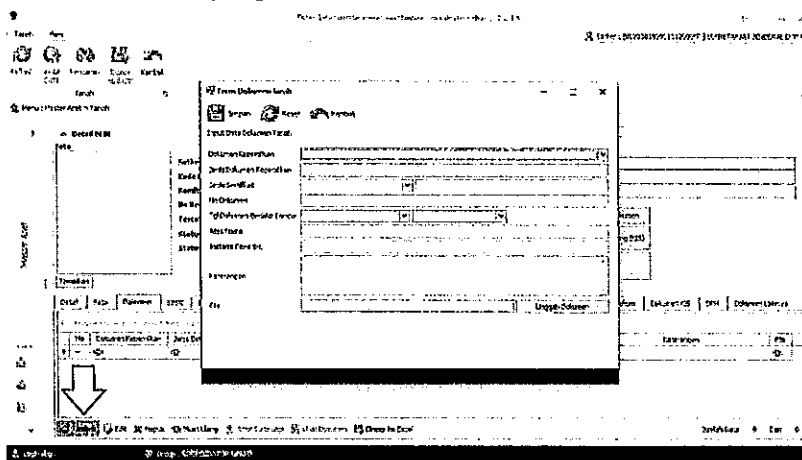
3. Klik Data Master Aset "Tanah", lalu pilih data tanah yang akan di-update



4. Pilih Tab “Dokumen” Untuk masuk ke tampilan pengisian/update Dokumen tanah



5. Pilih “Tambah” untuk mengisi data dokumen tanah, atau “Edit” untuk meng-update data dokumen tanah yang sudah ada



6. Pengisian *field* “Dokumen Kepemilikan”, diisi sesuai dokumen kepemilikan tanah terakhir yang ada, dengan kategori dokumen sebagai berikut :

- a. **Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q K/L (Sertipikat)**  
untuk tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga yang menguasai
- b. **Bersertipikat atas nama K/L (Sertipikat)**  
untuk tanah yang sudah bersertipikat namun masih atas nama Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga c.q. Satuan Kerja, maupun atas nama Satuan Kerja
- c. **Bersertipikat atas nama pihak ketiga (Sertipikat)**  
untuk tanah yang sudah bersertipikat namun masih atas nama pihak lain
- d. **Surat Pelepasan Hak (Tidak Bersertipikat)**
- e. **Akta Jual Beli (Tidak Bersertipikat)**
- f. **Dokumen Pengadaan Tanah (Tidak Bersertipikat)**
- g. **Petok D/Girik/Letter C (Tidak Bersertipikat)**

- h. Keputusan/Peraturan Desa (Tidak Bersertipikat)
  - i. Bukti Kepemilikan Lainnya (Tidak Bersertipikat)  
untuk tanah belum bersertipikat dengan dokumen selain poin d s.d h sebagaimana disebut di atas.
  - j. Tidak Ada Dokumen Kepemilikan  
untuk tanah tanpa dokumen
7. Pengisian *field* "Jenis Dokumen Kepemilikan" otomatis terisi setelah *field* "Dokumen Kepemilikan" pada poin 6 telah terisi.
  8. *Field* "Jenis Sertipikat" hanya dapat diisi bila isian *field* "Dokumen Kepemilikan" adalah salah satu dari Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L, Bersertipikat atas nama K/L, ataupun Bersertipikat atas nama Pihak Ketiga. Adapun Jenis Sertipikat yang dapat dipilih sebagai berikut :
    - a. Sertipikat Hak Pakai (SHP)
    - b. Sertipikat Hak Milik (SHM)
    - c. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)
    - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
  9. "Nomor Dokumen" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan Nomor Sertipikat dari tanah dimaksud. Nomor dokumen tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di *field* "Keterangan".
  10. "Tanggal Dokumen-Berlaku Sampai" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan tanggal penerbitan Sertipikat, dan tanggal masa berlakunya (apabila ada). Untuk tanggal dokumen dan tanggal masa berlakunya (apabila ada) tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di *field* "Keterangan".
  11. "Atas Nama" diisi dengan atas nama pemegang hak dari dokumen yang ada.
  12. "Instansi Penerbit" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan Kantor Pertanahan penerbit Sertipikat dimaksud. Untuk instansi penerbit tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di *field* "Keterangan".
  13. "Keterangan" dapat diisi dengan keterangan atau informasi lain yang diperlukan terkait tanah.
  14. "Unggah Dokumen" untuk mengunggah file *softcopy* dari Dokumen Tanah.
  15. Klik "Simpan" apabila data-data sudah terisi/terupdate.

-TERIMA KASIH-

**DJKN**

**DATA REKAPITULASI BMN BERUPA TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT HAK PAKAI  
 ATAS NAMA PEMERINTAH RI CQ MAHKAMAH AGUNG RI  
 UNTUK DIUSULKAN MENJADI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH TA 2022**

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
1	0199	Satker Pusat	005010199663157000KP	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2010101003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	4	1.474	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
2	0199	Satker Pusat	005010199663157000KP	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2010101003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5	1.540	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
3	0100	Jakarta	005010100526732000KD	PENGADILAN TUN JAKARTA	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	1.200	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
4	0200	Jawa Barat	005010200308166000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG (01)	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	298	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertipikasi Tahun 2022
5	0200	Jawa Barat	005010200097670000KD	PENGADILAN NEGERI CIREBON	2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	300	Tanpa Dokumen	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
6	0200	Jawa Barat	005010200400735000KD	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	180	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
7	0300	Jawa Tengah	005010300097720000KD	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	4.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
8	0300	Jawa Tengah	005010300097720000KD	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	1.600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
9	0300	Jawa Tengah	005010300097720000KD	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
10	0300	Jawa Tengah	005010300097720000KD	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	400	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
11	0300	Jawa Tengah	005010300097720000KD	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	400	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
12	0300	Jawa Tengah	005010300097713000KD	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	7	394	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022



No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
13	0300	Jawa Tengah	005010300097713000KD	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	350	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
14	0300	Jawa Tengah	005010300097713000KD	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	1.500	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
15	0300	Jawa Tengah	005010300097755000KD	PENGADILAN NEGERI KUDUS	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	268	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
16	0500	Jawa Timur	005010500098413000KD	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	391	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2023
17	0500	Jawa Timur	005010500401256000KD	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	2.188	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2024
18	0600	Aceh	005010600401695000KD	MAHKAMAH SYARTYAH KUALASIMPANG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	750	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
19	0600	Aceh	005010600401658000KD	MAHKAMAH SYARTYAH TAKENGON	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	7.500	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
20	0600	Aceh	005010600401642000KD	MAHKAMAH SYARTYAH LHOKSUKON	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	944	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
21	0600	Aceh	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5	529	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
22	0600	Aceh	005010600401761000KD	MAHKAMAH SYARTYAH TAPAKTUAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	6.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
23	0700	Sumatera Utara	005010700401777000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
24	0700	Sumatera Utara	005010700401880000KD	PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	5.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
25	0700	Sumatera Utara	005010700401880000KD	PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	6.500	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
26	0700	Sumatera Utara	005010700682232000KD	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	5.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
27	0700	Sumatera Utara	005010700682232000KD	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
28	0700	Sumatera Utara	005010700401840000KD	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	320	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
29	0700	Sumatera Utara	005010700098675000KD	PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	450	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
30	0800	Sumatera Barat	005010800098792000KD	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
31	0800	Sumatera Barat	005010800098764000KD	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	10.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
32	0900	Riau	005010900402123000KD	PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	602	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
33	0900	Riau	005010900402072000KD	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	1.250	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
34	1000	Jambi	005011000652020000KD	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	2.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
35	1000	Jambi	005011000547661000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	1.600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertipikasi Tahun 2022
36	1000	Jambi	005011000477374000KD	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	4.528	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
37	1000	Jambi	005011000477368000KD	PENGADILAN NEGERI TEBO	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
38	1000	Jambi	005011000098895000KD	PENGADILAN NEGERI JAMBI	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	8	3.553	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
39	1100	Sumatera Selatan	005011100672969000KD	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	1.464	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
40	1100	Sumatera Selatan	005011100526750000KD	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	8.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
41	1100	Sumatera Selatan	005011100098942000KD	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6	252	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
42	1100	Sumatera Selatan	005011100098942000KD	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	1.008	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
43	1100	Sumatera Selatan	005011100402273000KD	PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1.289	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
44	1400	Kalimantan Tengah	005011400401869000KD	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	7.750	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2023
45	1400	Kalimantan Tengah	005011400402468000KD	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	7.845	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertifikasi Tahun 2024
46	1400	Kalimantan Tengah	005011400099155000KD	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	536	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2025
47	1400	Kalimantan Tengah	005011400099155000KD	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2.496	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2026
48	1400	Kalimantan Tengah	005011400099120000KD	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	1.177	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2027
49	1700	Sulawesi Utara	005011700401925000KD	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	2010104004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1	1.987	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
50	1800	Sulawesi Tengah	005011800682192000KD	PENGADILAN AGAMA PARIGI	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	450	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
51	1800	Sulawesi Tengah	005011800652119000KD	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	20.050	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
52	1900	Sulawesi Selatan	005011900099439000KD	PENGADILAN NEGERI SUNGUMINASA	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	540	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2023
53	1900	Sulawesi Selatan	005011900099439000KD	PENGADILAN NEGERI SUNGUMINASA	2010201005	Tanah sawah irigasi	1	1.000	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
54	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	600	Belum Bersertifikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
55	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	198	Dokumen hilang	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
56	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	1.400	Belum Bersertipikat	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
57	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	1.561	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertifikasi Tahun 2022
58	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	7	1.491	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
59	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	8	2.500	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
60	1900	Sulawesi Selatan	005011900099418000KD	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	9	600	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
61	1900	Sulawesi Selatan	005011900099422000KD	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	7.187	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
62	1900	Sulawesi Selatan	005011900099422000KD	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	397	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
63	1900	Sulawesi Selatan	005011900099422000KD	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	900	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertifikasi Tahun 2022
64	1900	Sulawesi Selatan	005011900099422000KD	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	200	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertifikasi Tahun 2022
65	1900	Sulawesi Selatan	005011900099422000KD	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	200	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertifikasi Tahun 2022
66	1900	Sulawesi Selatan	005011900401928000KD	PENGADILAN NEGERI BELOPA	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3.500	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
67	1900	Sulawesi Selatan	005011900401928000KD	PENGADILAN NEGERI BELOPA	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	3.300	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022
68	1900	Sulawesi Selatan	005011900099464000KD	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	1.200	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertifikasi Tahun 2022

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
69	1900	Sulawesi Selatan	00501190030758000KD	PENGADILAN AGAMA PINRANG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3.150	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertipikasi Tahun 2022
70	1900	Sulawesi Selatan	005011900307619000KD	PENGADILAN AGAMA PALOPO	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	1.500	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertipikasi Tahun 2022
71	2000	Sulawesi Tenggara	005012000576253000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	8.898	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
72	2100	Maluku	005012100099691000KD	PENGADILAN TINGGI AMBON	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	10	270	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
73	2100	Maluku	005012100401894000KD	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	6.400	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
74	2100	Maluku	005012100307775000KD	PENGADILAN AGAMA MASOHI	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	100	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
75	2400	Nusa Tenggara Timur	005012400099926000KD	PENGADILAN NEGERI KUPANG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
76	2400	Nusa Tenggara Timur	005012400681418000KD	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	2010101003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	2.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
77	2500	Papua	005012500400022000KD	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	3.340	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
78	2500	Papua	005012500614890000KD	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA	2010101003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	5.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
79	2500	Papua	005012500614890000KD	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	3.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
80	2500	Papua	005012500400038000KD	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	509	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
81	2600	Bengkulu	005012600308014000KD	PENGADILAN AGAMA MANNA	2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	386	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
82	2800	Maluku Utara	005012800099731000KD	PENGADILAN NEGERI TERNATE (01)	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	8	220	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
83	2800	Maluku Utara	005012800099731000KD	PENGADILAN NEGERI TERNATE (01)	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	9	200	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
84	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	345	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
85	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	286	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
86	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	450	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
87	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	1.238	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
88	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2.453	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
89	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	1.535	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
90	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	2.374	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
91	2800	Maluku Utara	005012800099748000KD	PENGADILAN NEGERI TOBELO (01)	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	1.483	Dokumen hilang	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
92	2800	Maluku Utara	005012800307818000KD	PENGADILAN AGAMA LABUHA 01	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	200	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
93	2800	Maluku Utara	005012800307796000KD	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	365	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
94	2800	Maluku Utara	005012800307782000KD	PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS I B	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	410	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
95	3100	Gorontalo	005013100664539000KD	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	10.986	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
96	3200	Kepulauan Riau	005013200689309000KD	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3.125	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Kondisi Dokumen	Data	Keterangan
97	3200	Kepulauan Riau	005013200402160000KD	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	4.035	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
98	3200	Kepulauan Riau	005013200108309000KD	PENGADILAN NEGERI BATAM	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	3.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
99	3200	Kepulauan Riau	005013200098881000KD	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	7	1.457	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertipikasi Tahun 2022
100	3200	Kepulauan Riau	005013200098881000KD	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	1.824	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN	Target Sertipikasi Tahun 2022
101	3300	Papua Barat	005013300400081000KD	PENGADILAN NEGERI FAKFAK	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	1.615	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
102	3300	Papua Barat	005013300400075000KD	PENGADILAN NEGERI SORONG	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2.000	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
103	3400	Sulawesi Barat	005013400307630000KD	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	2.363	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	SATKER	Target Sertipikasi Tahun 2022
104	3500	Kalimantan Utara	005013500402675000KD	PENGADILAN AGAMA TARAkan	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	2	3.900	Belum Bersertipikat Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI	DJKN & BAWAS	Target Sertipikasi Tahun 2022
<b>Total</b>								<b>241.904</b>			

**Data Sumber : Daftar bidang tanah Mahkamah Agung RI hasil Money Auditor Bawas, DJKN Kemenkeu RI dan Tim Biro Perlengkapan yang diolah**

Keterangan:

1. Terdapat 104 bidang tanah yang belum bersertifikat dengan total luasan tanah seluas 241.904 m<sup>2</sup> dan tersebar di 26 wilayah dan 71 satuan kerja yang akan diusulkan untuk Program Sertipikasi Tanah TA 2022
2. Bidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> pada Pengadilan Negeri Cirebon belum memiliki bukti kepemilikan tanah
3. Wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku Utara adalah jumlah terbanyak bidang tanah yang belum bersertipikat hak pakai Pemerintah RI cq. MA RI dan dokumen, masing - masing adalah sebanyak 19 dan 13 bidang
4. Satuan Kerja PN Tobelo dan PT Makassar adalah jumlah terbanyak bidang tanah yang belum bersertipikat hak pakai Pemerintah RI cq. MA RI dan dokumen hilang, masing - masing adalah sebanyak 8 dan 7 bidang

  
**Kepala Biro Perlengkapan**  
  
**ROSFIANA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640612 198703 2 003**